

Judul : Cegah bencana hidrometeorologi, DPR dukung pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca
Tanggal : Minggu, 08 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Bencana Hidrometeorologi

DPR Dukung Pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca

Senayan mendorong penguatan anggaran bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk pengadaan alat-alat canggih dalam Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

ANGGOTA Komisi V DPR Sudjatmiko mengatakan, dukungan anggaran itu cukup mendesak mengingat curah hujan ekstrem kerap memicu bencana hidrometeorologi. Seperti curah hujan tinggi, angin kencang, dan suhu ekstrem. "Penggunaan TMC sangat efektif karena mampu menurunkan intensitas curah hujan hingga 30 persen," ujar Sudjatmiko di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Diketahui, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2025 menyebut terjadi 2.590 bencana di Indonesia. Sebanyak 90 persen diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi.

Ia mencontohkan wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng) telah menerapkan teknologi ini untuk mengantisipasi curah hujan di atas 150 mm per hari. Kondisi ini melampaui kapasitas normal

sistem drainase di kota-kota besar tersebut sehingga memicu bencana hidrometeorologi.

Dengan adanya dukungan anggaran dan teknologi yang mumpuni, Sudjatmiko optimis risiko bencana akibat siklon tropis atau cuaca ekstrem dapat dimitigasi lebih awal. Hal ini penting untuk memastikan informasi dari satelit yang dihimpun stasiun BMKG di tiap provinsi bisa ditindaklanjuti dengan aksi nyata.

Selain itu, bencana hidrometeorologi tidak bisa dilepaskan dari cara manusia dalam mengelola air, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur yang sering kali mengabaikan kaidah lingkungan. Akibatnya, air hujan yang pada dasarnya merupakan bagian dari fenomena alam yang membawa keberkahan, justru berubah menjadi sumber bencana.

Dengan itu, ia menekankan, air hujan semestinya dikelola melalui



Sudjatmiko

dua pendekatan utama. Pertama, air ditampung di permukaan bumi melalui waduk atau bendungan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. Seperti untuk pertanian, air minum, maupun kebutuhan lainnya. Kedua, air hujan perlu dimasukkan kembali ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah.

"Namun, pendekatan kedua, masih jarang dilakukan. Akibatnya, air hujan tidak terserap ke dalam tanah secara optimal dan langsung mengalir di permukaan, sehingga memicu banjir," ujar legiator dari daerah pemili-

han (dapil) Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Sudjatmiko mendorong perlunya menjaga daerah aliran sungai (DAS) agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman maupun komersial. Karena pelanggaran terhadap fungsi DAS kerap menjadi penyebab meluasnya banjir ke wilayah yang sebelumnya tidak terdampak.

Pemerintah juga harus melakukan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur. "Agar risiko banjir dapat ditekan secara berkelanjutan," harap politikus PKB ini.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menambahkan, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah berupa hutan lebat dan sungai yang luas. Dengan itu, diperlukan regulasi khusus, terutama saat kondisi cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi yang dapat membuat sungai meluap.

"Kekayaan alam yang menjadi berkah bisa berujung musibah apabila tidak dikelola secara bijak," kata Nasir dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Pemerintah, lanjutnya, mesti mampu menghadapi potensi bencana sekaligus mengawal agar cuaca ekstrem tidak menimbulkan dampak kerusakan yang besar bagi kehidupan, khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Bagaimana tanggapan BMKG? Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menyambut baik dukungan DPR. Saat ini pihaknya fokus memperkuat sistem peringatan dini agar informasi cuaca cepat sampai ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Langkah ini kata dia, penting dilakukan agar respons di lapangan bisa dilakukan lebih cepat. Tujuannya untuk menekan korban jiwa dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi.

"Semangat *early warning to early action* (peringatan dini menuju tindakan dini) dan target zero victim ini ke depan terus dikuatkan," tegas Andri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Andri mendorong semua pihak bergerak bersama, berkolaborasi, serta berkoordinasi antar kementerian, lembaga, dan juga pemda. ■ TIF